

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PADA TAHUN 2020-2022

Octaviana Nurmalasari¹, Tutut Dewi Astuti²

^{1,2}Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jl. Raya Wates-Yogyakarta, Karanglo, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55752
E-mail : Malaoctaviana08@gmail.com¹, Tutut@mercubuana-yogya.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanganan devisa yang sudah mulai dan dapat disesuaikan dengan cara menekan aktualisasi pendapatan dan anggaran berdasarkan asumsi yang akurat. Instansi yang menonjol dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tahun ajaran 2020–2022. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan Pemerintah Daerah Provinsi Sleman dengan Pemerintah Pusat dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada belum optimal sehingga teknik yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan jenis data tingkat kedua tertentu, dimana data yang dimaksud meliputi data realisasi anggaran, neraca, dan kas, serta data efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan daerah, dan data Rasio Keserasian.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Eektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian

ABSTRACT

This study was done to ascertain the workforce's proficiency in managing foreign exchange, which has already started and can be modified by pushing the actualization of income and budget based on reliable assumptions. The Sleman Regency Regional Financial and Asset Agency for the 2020–2022 stands out in this academic year. The method used in this research uses a specific type of second level data, where the data in question includes budget realization data, balance data, and other second level data. Based on the findings of the data analysis performed, it is known that the relationship between the Regional Government of Sleman Province and the Central Government in identifying and resolving existing problems is not yet optimal.

Keyword : Financial Performance, Regional Independence Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Compatibility Ratio

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemerintahan adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk mengubah hak-hak Bangsa dan Negara. Lembaga Pemerintahan pada umumnya bertugas melaksanakan inisiatif penjangkauan kepada masyarakat umum. Sebagai organisasi nirlaba, Lembaga Pemerintahan mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan dan kapasitas untuk meningkatkan pelayanan tersebut pada periode berikutnya. Tujuan yang

harus dicapai biasanya berbentuk tujuan kuantitatif, seperti peningkatan keamanan dan kenyamanan, retensi siswa, dan kesehatan siswa. Mengingat banyaknya perubahan di bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan politik pada masa reformasi, kemungkinan besar akan terjadi transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi dalam perumusan kebijakan publik, penggunaan pelayanan yang lebih terfokus oleh keprihatinan masyarakat umum, dan penerapan hukum secara konsensus.

Pemerintah daerah diberi mandat untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah serta desentralisasi keuangan. Otonomi Daerah merupakan perwujudan kewenangan dalam proses membangun pemahaman daerah secara lebih menyeluruh agar lebih sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah Daerah dan Undang-Undang: Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan edisi pertama Peraturan Daerah. Otonomi daerah memiliki makna koleratif dimana kemandirian dan kemandirian daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk kepentingan masyarakat

Halim (2020) menegaskan bahwa Undang-Undang yang dimaksud merupakan alat untuk mengarahkan lebih banyak sumber daya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah secara maksimal, mulai dari potensi untuk membangun, memperbesar, dan memperluas potensi. mengevaluasi, dan mengelola seluruh jumlah listrik sehari-hari agar dapat melayani seluruh wilayah dengan lebih baik. Namun demikian, menurut Yulianti (2019), satu-satunya strategi yang paling efektif bagi suatu daerah untuk menerapkan otonomi adalah dengan mengandalkan kapasitasnya untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menetapkan tingkat target pengembalian kepada Pemerintah Pusat.

Ciri utama suatu Daerah yang mampu melakukan otonomi, yaitu (1) Daerah harus mempunyai ide&keinginan dalam mengelola keuangannya sendiri dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Ini merupakan aturan mendasar bagi setiap daerah yang mampu menyelenggarakan otonomi. (2) Bergantung pada pemberian pusat harus diubah sesedikit mungkin. Namun, sejak Otonomi Daerah mulai beroperasi dua tahun yang lalu, dukungan finansial tertentu dari Pemerintah Daerah telah sangat besar bagi Pemerintah Pusat.

Ada beberapa urusan keuangan yang ditangani oleh Gubernur Kabupaten Sleman, antara lain: (1) Bergantung-nya Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap hibah dari Pemerintah Pusat, khususnya hibah dari

Daerah Otonom atau sudut anggaran Pemerintah Daerah; dan (2) Kurangnya kesanggupan Gubernur Kabupaten Sleman dalam menangani jumlah uang yang tersedia. Pendapatan Asli Daerah harus menjadi faktor kunci dalam mobilisasi sumber daya keuangan Pemerintah Daerah agar potensi daerah dapat terealisasi secara maksimal. Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat atau harus mengambil inisiatif untuk melakukan modifikasi rencana dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dari yang diperingatkan kepada Pemerintah Pusat.

Perbaikan pendanaan dan pengendalian keuangan daerah menempati posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan mewujudkan kinerja yang luas, nyata, dan sejahtera. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja tolak ukur periode mendatang, khususnya pada keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, penting untuk mengevaluasi akuntabilitas organisasi dan manajerial dalam konteks penjangkauan publik dalam skala yang lebih besar; hal ini melibatkan lebih dari sekedar memastikan bahwa dana publik telah digunakan; sebaliknya, hal ini melibatkan penentuan bahwa teknologi tersebut telah digunakan secara efisien dan efektif

Kamsir (2021) menjelaskan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang telah diplaning, baik oleh pribadi maupun organisasi. Dapat disimpulkan kinerja keuangan menjadi contoh kondisi keuangan suatu perusahaan yang diatur berdasarkan dasar akrual dengan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan. Sebaliknya menurut Putri (2020), Kinerja yaitu hasil kerja sebuah kelompok atau individu selama kurun waktu tertentu, yang menghambat semua kecuali satu individu atau kelompok tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Nurwahyuni (2021), Kinerja Keuangan Daerah adalah jumlah maksimum yang dapat diperoleh dari setiap tugas yang dilakukan di bidang penilaian mata uang daerah, termasuk penerimaan dan belanja daerah, dengan menggunakan indikator tertentu mata uang daerah yang ditentukan oleh menggunakan kebijakan atau ketentuan tertentu. Perundang-Undang pada era satu anggaran. Berdasarkan temuan penelitian ini,

kunci penggunaan Rasio Kinerja Keuangan Daerah dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Beberapa rasio yang dapat digunakan antara lain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian

2. LANDASAN TEORI

Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah diselesaikan oleh sekelompok pegawai yang sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan baginya (Arifin, 2019). Selain itu, pekerjaan dapat digambarkan sebagai “tingkah laku” seseorang selama pelaksanaan suatu tugas atau sebagai “tingkah laku” sehubungan dengan tanggung jawab suatu tugas. Menurut Putri (2020), “kinerja” diartikan sebagai hasil kerja individu atau kelompok selama tenggat waktu tertentu yang mencerminkan seberapa baik individu atau kelompok tersebut melakukan tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan suatu organisasi .

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ketika bantuan yang efektif diberikan kepada masyarakat, maka jumlah penduduk suatu daerah dapat meningkat. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil proyek atau program yang berhasil setelah menggunakan anggaran tahunan yang berukuran tepat dan berkualitas tinggi. Tanpa adanya perlawanan langsung terhadap Pemerintah Pusat dan dengan kemampuan untuk menggunakan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi oleh Undang-undang Perundang-Undangan, tujuannya adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengembangan masyarakat. . (Syamsi, 2019). Data mengenai efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam menggunakan dana yang tersedia untuk pembangunan Daerah, baik pembangunan nosional maupun pembangunan aktual, dapat diperoleh dari laporan Kinerja Keuangan Daerah pada bagian di atas.

Hubungan Rasio Kemandirian Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ambang batas dimana suatu daerah dapat secara efektif melaksanakan inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah serta warga negaranya yang membayar pajak dan menerima retribusi ketika kebutuhan pokok suatu daerah terpenuhi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ialah hasil Pemasukan Asli Daerah, bukan Pendapatan Transfer, antara lain: Bagi hasil pajak, bukan bagi hasil sumber daya alam, Dana alokasi umum dan alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terfokus pada kerentanan daerah terkait pembayaran transfer. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menjadi semakin umum, yang menyebabkan perekonomian suatu negara akan menderita jika bekerjasama dengan pemerintah eksternal, dan hal sebaliknya juga terjadi. Rasio menampilkan tingkat partisipasi warga dalam pembangunan bangsa; Hal ini, seiring dengan semakin pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan bentuk retribusi pemerintah lainnya, menunjukkan bahwa tingkat keamanan warga negara semakin meningkat.

Hubungan Rasio Desentralisasi Fiskal dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan perbedaan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah, ditentukan Rasio Desentralisasi Fiskal. Ketika kontribusi PAD meningkat, kapasitas Pemerintah Daerah untuk melakukan desentralisasi juga meningkat.

Hubungan Rasio Efektivitas PAD dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Efektivitas PAD menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan PAD yang telah ditetapkan dan ditentukan dengan tujuan yang telah ditetapkan menurut potensi daerah setempat. Jika sebuah instansi berhasil mencapai tujuannya, maka diasumsikan bahwa instansi tersebut telah beroperasi secara efisien.

Hubungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2019) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbedaan antara jumlah uang yang dipinjam untuk melakukan pembayaran dengan jumlah uang yang sebenarnya diterima dalam pembayaran. Dalam melakukan evaluasi pendapatan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan efisien jika rasionya kurang dari 1

3. METODOLOGI

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari website <https://ppid.slemankab.go.id/> antara lain : Data Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas

Teknik Pengambilan Sampel

Untuk temuan utama penelitian ini yaitu menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Dengan melakukan studi Kepustakaan Pengumpulan data melalui studi kepustakaan merupakan keuntungan penting karena memungkinkan subjek untuk menggunakan semua informasi dan data yang berkaitan dengan situasi mereka sendiri. Selama penelitian, dokumen elektronik seperti e-book, artikel, laporan, dan lain-lain digunakan untuk mengumpulkan data. Bahan pustaka terdiri dari produk elektronik yang diperoleh dari database yang dapat diakses secara online; tidak perlu mencari data dengan datang secara langsung ke lapangan.

Definisi Operasional Variable dan Pengukuran

Variabel operasional adalah variabel yang tercakup dalam definisi konsep yang relevan secara operasional, praktis, dan non-nyata dalam penelitian yang relevan. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian merupakan beberapa variabel yang dipakai dalam analisis sistem keuangan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Untuk metodologi penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menganalisis transaksi keuangan dengan menggunakan data yang telah diolah sedemikian rupa untuk memberikan informasi yang sistematis dan akurat atas permasalahan yang akan dibahas. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100$$

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian

$$(\text{Rasio Belanja Operasi}) = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$(\text{Rasio Belanja Modal}) = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman merupakan langkah awal dalam menentukan tingkat aktivitas keuangan di wilayah tersebut pada periode perkiraan tahun 2020–2022. Rasio yang digunakan untuk menganalisis cara kerja BKAD di Sleman antara lain: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman.

Tabel. 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022

Uraian	Anggaran (Rp)		Tahun	
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan	2.697.335.484	2.541.050.870.613	2.793.328.384.635	3.005.980.155.062
Pendapatan Asli Daerah	770.675.023.451	788.247.742.427	803.679.358.729	1.061.064.803.656
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.348.958.270.965	1.271.979.511.950	1.366.608.643.179	1.411.087.776.251
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	147.541.745.000	73.459.098.000	147.541.745.000	139.140.652.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	423.506.342.952	271.705.395.590	454.227.185.187	388.379.064.216
Lain-lain Pendapatan Transfer	6.654.102.299	135.660.122.645	21.271.452.549	6.307.858.939
Belanja	3.063.792.544.726	2.532.122.645	2.714.312.898.539	3.040.474.126.755
Belanja Operasi	2.252.064.849.973	1.952.369.307.358	1.949.946.322.384	2.195.791.565.394
Belanja Modal	457.108.938.973	361.066.768.091	433.649.905.880	466.443.909.650
Belanja Tak Terduga	49.068.048.067	20.161.477.613	27.614.828.647	18.234.059.538
Belanja Transfer	305.550.707.713	198.571.656.123	303.101.841.633	360.004.592.173
Surplus/Defisit	-366.457.661.427	8.881.661.427	79.015.486.095	-34.493.971.692

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di Olah)

Hasil Penelitian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer} \times 100$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengidentifikasi tingkat kemampuan suatu daerah dimana suatu daerah dapat menerapkan kebijakannya sendiri dalam membangun dan menafkahi rakyatnya setelah mereka membayar pajak dan retribusi.

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 2, di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2020	788.246.742.427,73	1.617.144.005.540,00	48,74	Konsultatif
2021	803.679.358.719,08	1.968.377.573.366,50	40,82	Konsultatif
2022	1.061.064.803.656,40	1.938.607.492.467,44	54,73	Partisipatif

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di olah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2 di atas, kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman pola hubungannya berlangsung secara konsultatif dan partisipatif. Nilai Tertingginya Terdapat Pada Tahun 2022 Yaitu Sebesar 54,73% Nilai Terendah Berada Pada Tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah sudah mencapai tingkat yang rendah.

Hasil Penelitian Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini:

$$Rasio\ Desentralisasi = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100$$

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah.

Hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel 3, di bawah ini: Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DDF (%)	Kriteria
2020	788.246.742.427,73	2.541.050.870.612,73	31,02	Sedang
2021	803.679.358.719,08	2.793.328.384.634,58	28,71	Cukup
2022	1.061.064.803.656,40	3.005.980.155.062,84	35,29	Sedang

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di olah)

Dari hasil perhitungan pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman berada pada kriteria sedang dan cukup, dimulai pada tahun 2020 rasio desentralisasi fiskal pada BKAD Kabupaten Sleman sebesar 31,02%, lalu pada tahun 2021 turun menjadi 28,71%, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 35,29%. Meskipun setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan, rasio desentralisasi pada BKAD Kabupaten Sleman ini sudah dapat dikatakan cukup baik karena berada dalam skala interval 28,71%-35,29%.

Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini:

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan PAD yang telah direncanakan dan dibedakan dengan target yang sudah ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas ini maka semakin baik kinerja pemerintah daerahnya.

Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 4, di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2020	788.246.742.427,73	676.743.940.021,93	116,47	Efektif
2021	803.679.358.719,08	770.675.023.451,00	104,28	Efektif
2022	1.061.064.803.656,40	1.031.150.840.396,00	102,9	Efektif

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di olah)

Dari perhitungan pada tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman di tahun 2020-2022 efektif,

karena nilai yang didapatkan lebih dari 100%. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 116,47%, tahun 2021 sebesar 104,28% dan pada tahun 2022 sebesar 102,90%.

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbedaan antara besarnya dana yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2020	2.532.169.209.185,59	2.541.050.870.612,73	99,65	Kurang Efisien
2021	2.714.312.898.539,54	2.793.328.384.634,58	97,17	Kurang Efisien
2022	3.040.474.126.755,75	3.005.980.155.062,84	101,14	Tidak Efisien

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di Olah)

Hasil Perhitungan Rasio Kesorasian

Rasio Kesorasian dapat dihitung memakai rumus di bawah ini:

$$\text{Rasio Kesorasian}$$

$$(\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%)$$

$$(\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%)$$

Rasio Kesorasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mendahulukan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Hasil perhitungan Rasio Kesorasian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Kesorasian (Belanja Operasi)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi (%)
2020	2.598.886.169.551,78	1.952.369.307.358,01	75,12
2021	3.063.792.544.726,01	1.949.946.322.378,71	63,64
2022	3.294.274.837.020,55	2.195.791.565.394,29	66,65

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di Olah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6, rata-rata Rasio Kesorasian Belanja Operasi BKAD Kabupaten Sleman adalah 68,47%. Dimulai pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,12% , lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 63,64% dan kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 66,65%

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Kesorasian (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal (%)
2020	2.598.886.169.551,78	361.066.788.091,58	13,89
2021	3.063.792.544.726,01	433.649.905.880,83	14,15
2022	3.294.274.837.020,55	466.433.909.650,46	14,15

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman (Di Olah)

Dari hasil perhitungan pada tabel 7 di atas, diketahui rata-rata Rasio Kesorasian Belanja Modal BKAD Kabupaten Sleman yaitu 14,06%. Dimulai pada tahun 2020 dimana rasio tersebut sebesar 13,89%, lalu pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan menjadi 14,15%

5. KESIMPULAN

Sesuai analisis data yang telah selesai, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Rasio Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami kerugian dan saluran komunikasinya mencakup saluran konsultatif dan partisipatif karena beroperasi pada interval 25%-50% dan 50%-75%. Rasionya berurutan-turut dari tahun 2020 ke tahun 2022 masing-masing sebesar 48,74%, 40,82%, dan 54,73%.
2. Rasio Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dikategorikan kurang baik karena berada pada rentang 20,01%-30,00% dan 30,01%-40,00%. Pada tahun 2020 hingga 2022, laju perubahannya masing-masing sebesar 31,02%, 28,71%, dan 35,29%.

3. Berdasarkan Rasio Efektivitas PAD, bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman berada pada tingkat sangat efektif, dengan presentase efektivitasnya masing-masing sebesar 116,47%, 104,28%, dan 102,9%.
4. Berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 99,32%, mungkin dianggap kurang efisien. Masing-masing rasionya yaitu sebesar: 99,65%, 97,17%, dan 101,14 persen
5. Jika informasi dari Rasio Keserasian dapat dipercaya, maka kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak stabil dari tahun ke tahun karena modal belanja lebih kecil dibandingkan belanja operasi. Besarnya belanja pegawai dan semakin banyaknya Pegawai Negeri Sipil menjadi penyebab tingginya rata-rata belanja operasi sebesar 68,47%. Sebaliknya, rasio rata-rata belanja modalnya adalah sekitar 14,05% yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman masih belum sepenuhnya mendukung pembangunan daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. (2020). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 - 2019)." Yogyakarta: FE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhidayat, (2005). *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No. 32 Tahun 2004 & UU RI No. 33 Tahun 2004*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Halim. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yuliahwati Tan. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Putri, S. H. (2020). *Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Mndeline*. Bengkulu: Jurnal Manajemen Modal Insani dan Bisnis
- Nurwahyuni. (2021). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora" . *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*
- Syamsi. (2019). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri *Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Wulandari. (2019). "Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2). November.
- Mahsun. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurul. (2020). "Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja

Keuangan Daerah Kabupaten
Bulukumba”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin Makassar

Juvitta. (2020). “Analisis Kinerja
Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Sangihe dan Kabupaten
Kepulauan Sitaro”. *Skripsi* Fakultas
Ekonomi Universitas Sam Ratulangi

Nurhayati. (2018). “Analisis Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Serang”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten

Faishal Hakim. (2018). “Analisis Kinerja
Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten
Sleman”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Yogyakarta

Azilla. (2020). “Analisis Rasio Keuangan
Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Tebing Tinggi”. *Skripsi*
Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor
Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

<https://bkad.slemankab.go.id>